

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntansi

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi

Pengertian Akuntansi menurut Hans Kartikahadi, dkk. (2016:3) pengertian akuntansi adalah :

“Akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan”.

Pengertian Akuntansi menurut Kieso, et al (2016:2) pengertian akuntansi adalah :

“Accounting consist of the three basic activities —it identifies, records, and communicates the economic events of an organization to interest users. A company identifies the economic events relevant to its business and then records those events in order to provide a history of financial activities. Recording consists of keeping a systematic, chronological diary of events, measured in dollar and cents. Finally, communicates the collected information to interest user by means accounting reports are called financial statement”.

Pengertian akuntansi menurut Weygandt, Kimmel & Kieso diterjemahkan oleh Ali Akbar Yulianto, Warsilah, Rangga Handika (2011:7) :

“Akuntansi adalah sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak yang memiliki kepentingan”.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan pencatatan informasi dari sebuah laporan keuangan yang dibutuhkan oleh pihak internal maupun eksternal yang berguna bagi pemilik kepentingan di dalamnya. Adapun Informasi ekonomi yang dihasilkan akuntansi sebagai alat untuk pengambilan keputusan.

2.1.1.2 Bidang-bidang Akuntansi

Menurut Abubakar Arif dan Wibowo (2005:6-7), bidang-bidang akuntansi terbagi menjadi 9 (sembilan) bagian yaitu :

1. “Akuntansi Keuangan (*Financial Accounting*)
Bidang akuntansi dari suatu entitas ekonomi secara keseluruhan. Akuntansi ini menghasilkan laporan keuangan yang ditujukan untuk semua pihak khususnya pihak-pihak dari luar perusahaan, sehingga laporan yang dihasilkannya bersifat serbaguna (*general purpose*).
2. Akuntansi Pemeriksaan (*Auditing*)
Bidang yang menyangkut pemeriksaan laporan-laporan keuangan melalui catatan akuntansi secara bebas yaitu laporan keuangan tersebut diperiksa mengenai kejujuran dan kebenarannya.
3. Akuntansi Manajemen (*Management Accounting*)
Bidang akuntansi yang menggunakan baik data historis maupun data-data taksiran dalam membantu manajemen untuk merencanakan operasi-operasi di masa yang akan datang.
4. Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*)
Bidang akuntansi yang mencakup penyusunan laporan-laporan pajak dan pertimbangan tentang konsekuensi-konsekuensi dari transaksi-transaksi perusahaan yang akan terjadi.
5. Akuntansi *Budgeter* (*Budgetary Accounting*)
Bidang akuntansi yang merencanakan operasi-operasi keuangan (anggaran) untuk suatu periode dan memberikan perbandingan antara operasi-operasi yang sebenarnya dengan operasi yang direncanakan.
6. Akuntansi untuk Organisasi Nirlaba (*Non Profit Accounting*)

Bidang yang mengkhususkan diri dari pencatatan transaksi-transaksi perusahaan yang tidak mencari laba seperti organisasi keagamaan dan yayasan-yayasan sosial.

7. Akuntansi Biaya (*Cost Accounting*)
Bidang yang menekankan penentuan dan pemakaian biaya serta pengendalian biaya tersebut yang pada umumnya terdapat dalam perusahaan industri.
8. Sistem Akuntansi (*System Accounting*)
Meliputi semua teknik, metode dan prosedur untuk mencatat dan mengolah data akuntansi dalam rangka memperoleh pengendalian internal yang baik, di mana pengendalian internal merupakan suatu sistem pengendalian yang diperoleh dengan adanya struktur organisasi yang memungkinkan adanya pembagian tugas dan sumber daya manusia yang cakap dan praktek-praktek yang sehat.
9. Akuntansi Sosial (*Social Accounting*)
Bidang yang terbaru dalam akuntansi dan yang paing sulit untuk diterangkan secara singkat, karena menyangkut dana-dana kesejahteraan masyarakat”.

2.1.2 Akuntansi Perpajakan

2.1.2.1 Pengertian Akuntansi Perpajakan

Menurut Sukrisno Agoes (2014:10) menjelaskan akuntansi pajak sebagai berikut :

“Akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan disebut akuntansi pajak. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak WP dapat dengan lebih mudah menyusun SPT. Sedangkan akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun, untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia”.

Adapun Akuntansi Pajak menurut Waluyo (2014:35) adalah sebagai berikut:

“Dalam menetapkan besarnya pajak terhutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat tentang perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporan yang ditetapkan dengan undang-undang”.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi pajak adalah pencatatan transaksi yang hanya berhubungan dengan pajak untuk mempermudah penyusunan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) masa dan tahunan pajak penghasilan.

2.1.2.2 Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan

Konsep dasar Akuntansi Perpajakan menurut Sukrisno Agoes (2014:11) sebagai berikut :

1. “Pengukuran dalam Mata Uang, satuan mata uang adalah pengukur yang sangat penting dalam dunia usaha.
2. Kesatuan Akuntansi, suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila transaksi yang terjadi dengan pemiliknya.
3. Konsep Kesenambungan, dalam konsep diatur bahwa tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk berkembang dan mempunyai kelangsungan hidup seterusnya.
4. Konsep Nilai Historis, transaksi bisnis dicatat berdasarkan harga pada saat terjadinya transaksi tersebut.
5. Periode Akuntansi, periode akuntansi tersebut sesuai dengan konsep kesinambungan dimana hal ini mengacu pada Pasal 28 Ayat 6 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009.
6. Konsep Taat Asas, dalam konsep ini penggunaan metode akuntansi dari satu periode ke periode berikutnya haruslah sama.
7. Konsep Materialitas, konsep ini diatur dalam Pasal 9 Ayat 2 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.
8. Konsep Konservatisme, dalam konsep ini penghasilan hanya diakui melalui transaksi, tetapi sebaliknya kerugian dapat dicatat walaupun belum terjadi.
9. Konsep Realisasi, menurut konsep ini penghasilan hanya dilaporkan apabila telah terjadi transaksi penjualan.
10. Konsep Mempertemukan Biaya dan Penghasilan, laba neto diukur dengan perbedaan antara penghasilan dan beban pada periode yang sama”.

2.1.3 Tax Planning

2.1.3.1 Pengertian Tax Planning

Menurut Suandy (2011:6) pengertian perencanaan pajak adalah:

“Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan langkah awal dalam melakukan manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak”.

Menurut perencanaan pajak menurut Harnanto (2013:19) adalah :

“Minimalisasi penghasilan kena pajak dalam tahun berjalan dapat diinterpretasi sebagai maksimalisasi penghasilan kena pajak atau pajak penghasilan yang terhutang dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan mengidentifikasi dan memanfaatkan tarif pajak yang relevan dalam membuat keputusan keputusan menyangkut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan”.

Pengertian perencanaan pajak yang dikemukakan oleh Chairil Anwar (2013:18) adalah sebagai berikut :

“perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum”.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak merupakan usaha wajib pajak untuk mencapai efisiensi pembayaran beban pajak dengan meminimalisasi pembayaran beban pajak dengan tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan atau undang-undang perpajakan.

2.1.3.2 Tujuan *Tax Planning*

Tujuan dari perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*), karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali (Suandy, 2011:7).

Chairil Anwar (2013:21) mengemukakan bahwa secara umum tujuan pokok dari perencanaan pajak adalah sebagai berikut :

1. Meminimalisasi beban pajak yang terutang Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan.
2. Memaksimalkan laba setelah pajak
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus
4. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien dan efektif, sesuai dengan ketentuan perpajakan, yang antara lain meliputi :
 - a. mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi, baik sanksi administratif maupun pidana, seperti bunga, kenaikan denda, dan hokum kurungan atau penjara
 - b. melaksanakan secara efektif segala ketentuan undang-undang perpajakan yang terkait dengan pelaksanaanpemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPH pasal 21, pasal 22, dan pasal 23)”.

2.1.3.3 Motivasi *Tax Planning*

Menurut Erly Suandy (2011:11) motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu :

1. “Kebijakan perpajakan (*Tax Policy*).
Kebijakan perpajakan merupakan alternative bagi berbagai sasaran yang hendak di tuju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan pajak, terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak, diantaranya: jenis pajak yang akan dipungut, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan prosedur pembayaran pajak.
2. Undang-undang perpajakan (*Tax Law*)
Kenyataan menunjukkan bahwa dimanapun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain (Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Direktur Jenderal pajak). Tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapai. Akibatnya terbuka celah bagi wajib pajak untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan cermat untuk perencanaan pajak yang baik.
3. Administrasi perpajakan (*Tax Administration*)
Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk memaksimalkan data setelah pajak karena pajak ikut mempengaruhi

pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi melalui analisis yang cermat dan pemanfaatan peluang”.

2.1.3.4 *Strategi Tax Planning*

Menurut Suandy (2011:12) ada beberapa strategi dalam melakukan perencanaan pajak yaitu :

1. *“Tax Saving*
Tax saving adalah upaya untuk mengefisienkan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah.
2. *Tax Avoidance*
Tax avoidance adalah upaya mengefisienkan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak .
3. Penundaan/Penggeseran Pembayaran Pajak
Penundaan/penggeseran kewajiban pajak dapat dilakukan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.
4. Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan
Wajib pajak seringkali kurang mendapat informasi mengenai pembayaran yang dapat dikreditkan. Sebagai contoh : PPh pasal 22 atas pembelian solar dari Pertamina yang bersifat final jika pembeliannya perusahaan yang bergerak di bidang penyaluran migas.
5. Menghindari Pemeriksaan Pajak dengan Cara Menghindari Lebih Bayar
Menghindari pemeriksaan pajak dapat dilakukan dengan mengajukan pengurangan pembayaran angsuran PPh pasal 25 ke KPP yang bersangkutan, apabila berdasarkan estimasi dalam tahunan pajak yang bersangkutan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak. Selain itu dapat juga mengajukan permohonan pembebasan PPh pasal 22 impor apabila perusahaan melakukan impor.
6. Menghindari Pelanggaran Terhadap Peraturan Perpajakan
Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan”.

2.1.3.5 **Pengukuran Tax Planning**

Menurut Harnanto (2013:19) Perencanaan pajak dapat diukur dengan menggunakan rumus Tax retention rate (tingkat retensi pajak), Tax Retention Rate merupakan suatu alat dengan fungsi untuk menganalisis suatu ukuran dari efektivitas manajemen pajak pada laporan keuangan perusahaan tahun berjalan.

Menurut Harnanto (2013:19) Perencanaan pajak dapat diukur dengan:

$$TRR_{it} = \frac{Net\ Income_{it}}{EBIT_{1t}}$$

Keterangan:

TRR_{it} = Tax Retention Rate (tingkat retensi pajak) perusahaan i pada tahun t. Net Income_{it} = laba bersih perusahaan i pada tahun t.

EBIT_{it} = laba sebelum pajak perusahaan i pada tahun t

2.1.4 Beban Pajak Tangguhan

2.1.4.1 Pengertian Pajak Tangguhan

Menurut Harnanto (2013:115) mendefinisikan beban pajak tangguhan sebagai berikut :

“Beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan untuk pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak)”.

Menurut Waluyo (2012:273) pajak tangguhan adalah sebagai berikut :

“Pajak tangguhan sebagai jumlah pajak penghasilan yang terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dari sisa kerugian yang dapat dikompensasikan. Pengakuan pajak tangguhan berdampak terhadap berkurangnya laba atau rugi bersih sebagai akibat adanya kemungkinan pengakuan beban pajak tangguhan atau manfaat pajak tangguhan”.

Sedangkan beban pajak tangguhan menurut Waluyo (2012:28) adalah :

“Jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang muncul akibat adanya pengakuan atas liabilitas atau aset pajak tangguhan”.

Menurut PSAK No.46 pajak tangguhan adalah :

“Pajak tangguhan adalah saldo akun di neraca sebagai manfaat pajak yang jumlahnya merupakan jumlah estimasi yang akan dipulihkan dalam periode yang akan datang sebagai akibat adanya perbedaan sementara antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan dan akibat adanya saldo kerugian yang dapat dikompensasi pada periode mendatang”.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi dengan laba fiskal dimana pendapatan menurut akuntansi komersial lebih besar dari pada akuntansi fiskal dan pengeluaran menurut akuntansi komersial lebih kecil dari pada akuntansi fiskal.

2.1.4.2 Penyebab Perbedaan Antara Beban Pajak Dengan PPh Terutang

Penyebab perbedaan antara beban pajak penghasilan dengan PPh terutang menurut Purba (2009:14), dapat dikategorikan dalam dua kelompok :

1. Perbedaan Permanen atau Tetap Perbedaan ini terjadi karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, ada beberapa penghasilan yang tidak objek pajak sedangkan secara komersial penghasilan tersebut diakui sebagai penghasilan. Perbedaan ini mengakibatkan laba fiskal berbeda dengan laba komersial secara permanen.
2. Perbedaan Temporer atau Waktu Perbedaan ini terjadi berdasarkan ketentuan peraturan Undang-Undang Perpajakan merupakan penghasilan atau biaya yang boleh dikurangkan pada periode akuntansi terdahulu atau periode akuntansi berikutnya dari periode sekarang, misalnya:
 - a. Metode penyusutan, yang diakui fiskal adalah saldo menurun dan garis lurus.
 - b. Metode penilaian persediaan, yang diakui fiskal adalah FIFO dan rata-rata.
 - c. Penyisihan piutang tak tertagih, yang diakui fiskal kecuali untuk Perusahaan Pertambangan, *Leasing*, Perbankan dan Asuransi.
 - d. Rugi laba selisih kurs, yang diakui fiskal adalah kurs dari Menteri Perekonomian sedangkan yang diakui oleh akuntansi adalah kurs dari Bank Indonesia.

2.1.4.3 Kewajiban Beban Pajak Tangguhan Yang Tidak Diakui Sebagai Beda Temporer

Kewajiban pajak tangguhan harus diakui untuk setiap beda temporer kena pajak. Namun, tidak semua beda temporer dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal.

Menurut Purba (2009:35) terdapat pengecualian-pengecualian sebagai berikut :

1. Kewajiban pajak tangguhan yang berasal dari beda temporer investasi pada perusahaan asosiasi, anak perusahaan, dan *joint venture* tidak diakui

apabila induk perusahaan dan patner dapat mengendalikan waktu *reversal* beda temporer tersebut.

2. Kewajiban pajak tangguhan tidak diakui dari beda temporer yang muncul dari pengakuan awal *goodwill* yang berasal dari penggabungan usaha.
3. Kewajiban pajak tangguhan tidak diakui dari beda temporer yang muncul dari pengakuan aktiva dan kewajiban dalam suatu transaksi yang bukan merupakan transaksi penggabungan usaha. Transaksi penggabungan usaha tersebut tidak mempengaruhi baik laba akuntansi maupun laba yang dikenakan pajak.

Beda waktu terjadi adanya perbedaan pengakuan besarnya waktu secara akuntansi komersial dibandingkan dengan secara fiskal. Selisih dari perbedaan pengakuan antara laba akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal yang akan menghasilkan koreksi berupa koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif akan menghasilkan aktiva pajak tangguhan sedangkan koreksi negatif akan menghasilkan beban pajak tangguhan.

2.1.4.4 Pengukuran Beban Pajak Tangguhan

Menurut Harnanto (2011:115) beban pajak tangguhan dapat diukur dengan:

$$BBPT_{it} = \frac{\text{Beban pajak tangguhan}_{it}}{\text{Total aset}_{t-1}}$$

Keterangan:

$BBPT_{it}$ = Besaran beban pajak tangguhan perusahaan i tahun t

Perbedaan antara laporan keuangan, standar akuntansi dan fiskal disebabkan dalam penyusunan laporan keuangan, standar akuntansi lebih memberikan keleluasan bagi manajemen dalam menentukan prinsip dan asumsi dibandingkan yang diperoleh menurut pajak. Penghitungan tentang beban

pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan indikator membobot beban pajak tangguhan dengan total aktiva atau total aset. Hal ini dilakukan untuk pembobotan beban pajak tangguhan dengan total aset pada periode t-1 untuk memperoleh nilai yang dihitung dengan proporsional.

2.1.5 Ukuran Perusahaan

2.1.5.1 Pengertian Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan pada dasarnya adalah pengelompokan kedalam beberapa kelompok, diantaranya perusahaan besar, perusahaan menengah dan perusahaan kecil. Skala perusahaan merupakan ukuran yang dipakai untuk mencerminkan besar kecilnya perusahaan yang didasarkan kepada total aset perusahaan.

Menurut Brigham dan Houston (2009:5) ukuran perusahaan adalah :

“The firm size can be calculated from total net sales, total asset, total debt, and total equity of the current year up to the next few years.”

Menurut Brigham dan Huston yang dialihbahasakan oleh Ali Akbar Yulianto (2011:418) Pengertian Ukuran Perusahaan adalah sebagai berikut :

“Ukuran perusahaan adalah rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun. Dalam hal ini penjualan lebih besar daripada biaya variabel dan biaya tetap, maka akan diperoleh jumlah pendapatan sebelum pajak. sebaliknya jika penjualan lebih kecil daripada biaya variabel dan biaya tetap maka perusahaan akan menderita kerugian”.

Menurut Kieso (2011:192) pengertian ukuran perusahaan, yaitu :

“Assets is a resource controlled by the entity as a result of past event and from which future economic benefits are expected to flow to the entity”.

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa aktiva adalah sumber daya yang dikendalikan oleh suatu perusahaan sebagai akibat peristiwa masalalu dan diharapkan akan mendapat manfaat ekonomi masa depan untuk perusahaan.

Menurut Scott dalam Torang (2012:93) pengetahuan ukuran perusahaan adalah sebagai berikut :

“Ukuran perusahaan adalah suatu variabel konteks yang mengukur tuntutan pelayanan atau produk organisasi”.

Menurut Hartono (2015:254) ukuran perusahaan adalah :

“Besarnya kecilnya perusahaan dapat diukur dengan total aktiva/besarnya harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aktiva”.

Berdasarkan beberapa definisi diatas maka dapat diketahui bahwa ukuran perusahaan adalah skala yang menentukan besarnya kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari *equity*, nilai perusahaan, jumlah karyawan dan nilai total aktiva yang merupakan variabel konteks yang mengukur tuntutan pelayanan atau produk organisasi.

2.1.5.2 Klasifikasi Ukuran Perusahaan

Klasifikasi ukuran perusahaan menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 dibagi kedalam 4 (empat) kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar.

Pengertian dari usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar menurut pasal 1 UU No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah adalah sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

2. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

2.1.5.3 Jenis-jenis Perusahaan

Sukirno (2011:190) menjelaskan bahwa organisasi perusahaan dapat dibedakan ke dalam tiga bentuk organisasi yang pokok, yaitu:

1. Perusahaan perseorangan Perusahaan perseorangan merupakan perusahaan yang dimiliki oleh satu orang sehingga pemiliknya memiliki kebebasan yang tidak terbatas. Ia sepenuhnya menguasai perusahaan dan dapat melakukan apapun tindakan yang dianggapnya untuk menguntungkan usahanya.
2. Firma Firma merupakan organisasi yang dimiliki oleh beberapa orang. Mereka sepakat untuk menjalankan suatu usaha dan membagi keuntungan yang diperoleh berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama. Modal perusahaan berasal dari para anggotanya, adakalanya mereka juga meminjam modal dari lembaga-lembaga lain.
3. Perseroan Terbatas Perusahaan-perusahaan besar kebanyakan berbentuk perseroan terbatas. Perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas dapat mengumpulkan modal dengan mengeluarkan saham.

Ketiga bentuk organisasi atau perusahaan tersebut merupakan badan usaha swasta yang artinya didirikan oleh orang atau badan swasta. Bentuk organisasi atau perusahaan tersebut bergerak pada kegiatan usaha yang berbeda-beda, sehingga bentuk perusahaan itu sendiri dapat dibagi menjadi beberapa kategori.

Menurut Hery (2016:2), ditinjau dari jenis usahanya (produk yang dijual), perusahaan dibedakan menjadi:

1. Perusahaan Manufaktur (*Manufacturing Business*). Perusahaan jenis ini terlebih dahulu mengubah (merakit) input atau bahan mentah (*raw material*) menjadi output atau barang jadi (*finished goods/final good*), baru kemudian dijual kepada para pelanggan (distributor). Contoh perusahaan manufaktur, diantaranya adalah: perusahaan perakitan mobil, komputer, perusahaan pembuat (pabrik) obat, tas, sepatu, pabrik penghasil keramik, dan sebagainya.
2. Perusahaan Dagang (*Merchandising Business*). Perusahaan jenis ini menjual produk (barang jadi), akan tetapi perusahaan tidak membuat/menghasilkan sendiri produk yang akan dijualnya melainkan memperolehnya dari perusahaan lain. Contoh perusahaan dagang diantaranya adalah: Indomaret, AlfaMart, Carrefour, Gramedia, dan sebagainya.
3. Perusahaan jasa (*service business*). Perusahaan jenis ini tidak menjual barang tetapi menjual jasa kepada pelanggan. Contoh perusahaan jasa diantaranya adalah: perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan transportasi (jasa angkut), pelayanan kesehatan (rumah sakit) dan sebagainya.

2.1.5.4 Pengukuran Ukuran Perusahaan

Menurut Bestivano (2013:6) ukuran perusahaan bisa diukur dengan menggunakan total aktiva, pendapatan atau modal dari perusahaan tersebut. Salah satu tolak ukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah ukuran aktiva dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan, dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibandingkan perusahaan dengan total aset yang kecil.

Menurut Hartono (2015:282) pengukuran ukuran perusahaan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\ln \text{ Total Asset}$$

Keterangan:

Ln = Logaritma natural

2.1.5.5 Definisi Aset

Definisi aset menurut Walter T. Harisson Jr. et. al yang dialih bahasakan oleh Gina Gania (2013:11) adalah sebagai berikut :

“Aset (*assets*) adalah sumber daya ekonomi yang dikendalikan oleh entitas yang diharapkan akan menghasilkan manfaat ekonomi di masa mendatang bagi entitas”.

Menurut James R. Reeve et. al. yang dialihbahasakan oleh Damayanti Dian (2013: 5) definisi aset adalah sebagai berikut :

“Aset (*assets*), kadang juga disebut aktiva atau harta, adalah sumber daya yang dimiliki oleh entitas bisnis. Sumber daya tersebut dapat berupa benda yang mempunyai wujud fisik, seperti kas dan bahan habis pakai, atau benda yang tidak berwujud tapi memiliki nilai, seperti hak paten”.

Menurut Firdaus A. Dunia (2013:26) pengertian aset adalah sebagai berikut:

“Aset adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan yang memberi manfaat ekonomi di masa depan”.

Definisi aset menurut Sujarweni (2016:28) definisi aset adalah sebagai berikut :

“Harta/aktiva (*assets*) adalah setiap sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dan berguna pada waktu sekarang dan waktu yang akan datang, diharapkan akan mendapat manfaat ekonomi di masa depan”.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa aktiva/aset adalah sumber daya atau harta kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang

diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa sekarang ataupun di masa depan bagi perusahaan.

2.1.5.6 Jenis-jenis Aset

Menurut Walter T. Harisson Jr. et. al. yang dialihbahasakan oleh Gina Gania (2013:20) terdapat dua kategori aset yang utama, yaitu:

1. “Aset lancar
2. Aset tidak lancar (yang kadang-kadang disebut juga sebagai jangka panjang)”.

Menurut Walter T. Harisson Jr. et. al. yang dialihbahasakan oleh Gina Gania (2013:20) definisi aset lancar adalah sebagai berikut:

“Aset lancar (*current assets*) adalah aset yang diharapkan akan dikonversi menjadi kas, dijual, atau dikonsumsi selama 12 bulan ke depan atau dalam siklus operasi bisnis. Aset lan car pada umumnya meliputi kas, investasi jangka pendek, piutang (juga disebut debitor), persediaan barang dagang, dan beban dibayar di muka”.

Menurut Walter T. Harisson Jr. et. al. yang dialih bahasakan oleh Gina Gania (2013:403) menjelaskan aset tidak lancar adalah sebagai berikut :

“Kategori utama aset jangka panjang atau tidak lancar adalah *property*, pabrik, dan peralatan (*property, plant and equipment =PPE*) dan aset tidak berwujud. Jenis- jenis aset tidak lancer adalah sebagai berikut :

- a. Properti, pabrik, dan peralatan (PPE), yang terkadang disebut aset tetap, adalah aset tidak lancar atau jangka panjang yang berwujud misalnya, tanah, bangunan, dan peralatan. Aset tersebut digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administrasi; dan diharapkan akan digunakan selama lebih dari satu periode. Alokasi biaya PPE selama umur manfaatnya disebut penyusutan (*depreciation*).
- b. Aset tidak lancar konstruksi dalam pelaksanaan (*construction in progress*). Akun ini adalah “*placeholder*” bagi aset yang sedang dibangun. Begitu selesai, biaya aset yang telah diakumulasikan pada akun konstruksi dalam pelaksanaan kemudian dipindahkan ke akun properti, pabrik, dan peralatann/PPE (atau Aset Tidak Berwujud).
- c. Aset tidak berwujud (*intangible assets*) adalah aset *non moneter* yang dapat diidentifikasi tanpa substansi fisik. *Non moneter* berarti bahwa

aset tidak diekspresikan dalam jumlah tetap atau jumlah uang yang dapat ditentukan. Aset tidak berwujud tersebut bersifat unik karena tidak memiliki fisik.

- d. Properti investasi (*Investment Properties*) sebagai aset lancar. Ini adalah kelas properti bertujuan khusus (tanah dan/atau bangunan) yang dipegang untuk menghasilkan sewa atau apresiasi modal atau keduanya, dan bukan untuk pemakaian yang terkait dengan penjualan, produksi, atau fungsi administrasi”.

2.1.6 Manajemen Laba

2.1.6.1 Pengertian Manajemen Laba

Menurut Sri Sulistyanto (2008: 6) manajemen laba adalah :

”Upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan”.

Pengertian earnings management menurut Theodorus M. Tuanakotta (2013:210) adalah sebagai berikut :

“Pengelolaan laba (*earnings management activities*) adalah bagian-bagian dari rekayasa keuangan yang lazim di pasar modal. Magrath dan Weld membedakan kegiatan pengelolaan laba yang merupakan praktik bisnis yang sehat (*good business practices*) dan pengelolaan laba yang merupakan penyalahgunaan (*abusive earnings management*). Pengelolaan laba yang merupakan penyalahgunaan (selanjutnya diistilahkan sebagai “pengelolaan laba abusif”) bertujuan menipu masyarakat penanam modal”. Menurut Charles W. Mulford dan Eugene E. Comiskey (2010:81) earnings

management adalah :

“Manajemen laba adalah manipulasi akuntansi dengan tujuan menciptakan kinerja perusahaan agar terkesan lebih baik dari yang sebenarnya”.

Berdasarkan beberapa pengertian dari para ahli sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa manajemen laba dilakukan secara sengaja, dalam batasan untuk mengarah pada suatu tingkat laba yang diinginkan. Tindakan ini merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan (mengurangi) laba yang dilaporkan saat ini

atas unit dimana manajer bertanggung jawab, tanpa mengakibatkan peningkatan (penurunan) profitabilitas ekonomis jangka panjang unit tersebut.

2.1.6.2 Strategi Manajemen Laba

Menurut Sulistyanto (2012:27) manajemen laba dapat dibagi menjadi empat bentuk yaitu :

1. *Income Minimization*
Manajemen laba ini dilakukan pada saat perusahaan mempunyai keuntungan yang tinggi dan tujuan perusahaan adalah untuk menghindari atau meminimalisasi pajak.
2. *Income Maximization*
Pola ini dilakukan saat manajemen berusaha meningkatkan pendapatan dengan melaporkan laba bersih yang tinggi untuk tujuan bonus yang lebih besar, yaitu dengan cara mengakui pendapatan periode berikutnya ke periode sekarang atau mengakui beban periode sekarang ke periode mendatang.
3. *Taking Bath*
Pola ini biasanya dilakukan pada saat perusahaan mengalami tekanan atau restrukturisasi, yaitu dengan mengakui biaya yang sebenarnya baru terjadi di periode yang akan datang ke periode sekarang. Hal tersebut dilakukan untuk mendapat keuntungan yang tinggi pada periode mendatang.
4. *Income smoothing*
Manajemen memiliki insentif untuk melakukan perataan penghasilan untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan sehingga perusahaan terlihat stabil.

2.1.6.3 Motivasi Manajemen Laba

Menurut Sri Sulistyanto (2012:63) mengemukakan terdapat terjadinya motivasi manajemen laba sebagai berikut :

1. *Bonus Scheme Hypothesis*
Kompensasi (bonus) yang didasarkan pada besarnya laba yang dilaporkan akan memotivasi manajemen untuk memilih prosedur akuntansi yang meningkatkan keuntungan yang dilaporkan demi memaksimalkan bonus mereka. Bonus minimal hanya akan dibagikan jika laba mencapai target laba minimal tertentu dan bonus maksimal dibagikan jika laba mencapai nilai tertentu atau lebih besar.
2. *Contracting Incentive*
Motivasi ini muncul ketika perusahaan melakukan pinjaman hutang yang berisikan perjanjian untuk melindungi kreditur dari aksi manajer yang tidak sesuai dengan kepentingan kreditur, seperti deviden yang berlebihan, pinjaman tambahan, atau membiarkan modal kerja atas laporan ekuitas berada di bawah tingkat yang ditetapkan, yang semuanya dapat

meningkatkan risiko bagi kreditur, karena pelanggaran perjanjian dapat mengakibatkan biaya yang tinggi sehingga manajer perusahaan berharap untuk menghindarinya. Jadi manajemen laba dapat muncul sebagai alat untuk mengurangi kemungkinan pelanggaran perjanjian dalam kontrak hutang.

3. *Political Motivation*

Laba digunakan untuk mengurangi laba yang dilaporkan pada perusahaan publik. Perusahaan cenderung mengurangi laba yang dilaporkan karena adanya tekanan publik yang mengakibatkan pemerintah menetapkan peraturan yang lebih ketat.

4. *Tax Motivation*

Perpajakan merupakan motivasi yang paling jelas untuk melakukan manajemen laba. Manajemen berusaha untuk mengatur labanya agar pembayaran pajak lebih rendah dari yang seharusnya sehingga didapat penghematan pajak.

5. *Incentive Chief Executive Officer (CEO)*

CEO yang mendekati masa pensiun akan cenderung menaikkan pendapatan untuk meningkatkan bonus mereka. Dan jika kinerja perusahaan buruk, mereka akan memaksimalkan pendapatan agar tidak diberhentikan.

6. *Initial Public Offering (IPO)*

Perusahaan yang akan *go public* belum memiliki nilai pasar, dan menyebabkan manajer perusahaan yang akan *go public* melakukan manajemen laba dalam *prospectus* mereka dengan harapan dapat menaikkan harga saham perusahaan.

2.1.6.4 Pola Dan Teknik Manajemen Laba

Menurut Sulistyanto (2012:37) teknik manajemen laba dapat juga

dilakukan dengan tiga teknik yaitu :

1. Meninjau kembali dan mengubah berbagai estimasi akuntansi Permainan manejerial ini biasa dilakukan dengan meninjau kembali dan mengubah berbagai estimasi akuntansi yang selama ini telah digunakan perusahaan. Sebagai contoh adalah umur ekonomis aktiva tetap (*tangible assets*) dan aktiva tidak berwujud (*intangible assets*), prosentase biaya kerugian piutang, dan lain-lain.
2. Mengubah atau mengganti metode akuntansi Manajer mempunyai kebebasan untuk mengubah atau mengganti metode akuntansi yang selama ini dipakainya dengan metode akuntansi lain. Hal inilah yang mendorong atau memotivasi seorang menejer untuk mengoptimalkan kepentingan dan kesejahteraan pribadi. Seorang menejer hanya mau menggunakan suatu metode akuntansi tertentu apabila ada manfaat yang bias diperoleh.
3. Permasalahan cadangan Cadangan (*reserves*) merupakan laba yang ditarik ke belakang dari periode pengakuan sesungguhnya dan menggunakan pada saat dibutuhkan. Sebagai contoh adalah cadangan kerugian piutang, penurunan nilai persediaan, dan lain-lain. Hal ini dilakukan perusahaan dengan tujuan agar laba yang dilaporkan perusahaan pada periode berjalan

tidak terlalu tinggi. Sebaliknya, pada saat menginginkan labanya menjadi lebih tinggi maka perusahaan dapat menggunakan cadangan itu untuk mengatur laba sesuai dengan keinginannya itu.

Menurut Sulistyanto (2008:177) pola manajemen laba antara lain:

1. Peningkatan laba (*income increasing*)
Peningkatan laba (*income increasing*) adalah upaya perusahaan mengatur agar laba periode berjalan menjadi lebih tinggi daripada laba sesungguhnya. Upaya ini dilakukan dengan mempermainkan pendapatan periode berjalan menjadi lebih tinggi daripada pendapatan sesungguhnya dan atau biaya periode berjalan menjadi lebih rendah dari biaya sesungguhnya
 2. Penurunan laba (*income decreasing*)
Penurunan laba (*income decreasing*) adalah upaya perusahaan mengatur laba periode berjalan menjadi lebih rendah daripada laba sesungguhnya. Upaya ini dilakukan dengan mempermainkan pendapatan periode berjalan menjadi lebih rendah daripada pendapatan sesungguhnya dan atau biaya periode berjalan menjadi lebih tinggi dari biaya sesungguhnya.
 3. Perataan laba (*income smoothing*)
Perataan laba (*income smoothing*) adalah upaya perusahaan mengatur agar labanya relatif sama selama beberapa periode. Upaya ini dilakukan dengan mempermainkan pendapatan dan biaya periode berjalan menjadi lebih tinggi atau lebih rendah daripada pendapatan atau biaya sesungguhnya.
- Menurut Sulistyanto (2008:34) ada empat cara yang digunakan manajer

untuk melakukan manajemen laba, yaitu:

1. Mengakui dan mencatat pendapatan lebih cepat satu periode atau lebih
2. Mengakui pendapatan lebih lambat satu periode atau lebih
3. Mencatat pendapatan palsu
4. Mengakui dan mencatat biaya lebih cepat atau lambat

2.1.6.5 Indikator Manajemen laba

Sulistyanto, 2012:161 menyebutkan Manajemen Laba adalah :

“Manajemen laba dilakukan dengan mempermainkan komponen-komponen akrual dalam laporan keuangan sebab akrual merupakan komponen yang mudah untuk dipermainkan sesuai dengan keinginan orang yang melakukan pencatatan transaksi dan menyusun laporan keuangan”.

Menurut Sulistyanto, 2012:163 Langkah awal untuk mengidentifikasi manajemen laba adalah:

“Langkah awal untuk mengidentifikasi manajemen laba adalah dengan mengeluarkan komponen kas dari model akuntansi berbasis akrual untuk menghitung dan menentukan besarnya komponen akrual yang diperoleh perusahaan selama satu periode tertentu. Untuk itu laba akuntansi di atas harus dikurangi dengan arus kas yang diperoleh dari operasi perusahaan (*Cash flow from operation*) selama periode bersangkutan”.

Menurut Sulistyanto, 2012:164 Setelah berhasil menentukan besarnya komponen akrual yang diperoleh perusahaan selama satu periode, maka langkah kedua adalah:

“Memisahkan komponen akrual itu menjadi dua komponen utama, yaitu *discretionary accruals* dan *nondiscretionary accruals*. *Discretionary accruals* merupakan komponen akrual hasil rekayasa manajerial dengan memanfaatkan kebebasan dan keleluasaan dalam estimasi dan pemakaian standar akuntansi. Sementara itu, *nondiscretionary accruals* merupakan komponen akrual yang diperoleh secara alamiah dari dasar pencatatan akrual dengan mengikuti standar akuntansi yang diterima secara umum.”

2.1.6.6 Pengukuran Manajemen Laba

Menurut Sri Sulityanto (2008:2016), model empiris bertujuan untuk mendeteksi manajemen laba, pertama kali dikembangkan oleh Healy, dan De Angelo. Adapun penjelasan mengenai model tersebut antara lain:

1. Model Healy

Model empiris untuk mendeteksi manajemen laba pertama kali dikembangkan oleh Healy pada tahun (1985).

Langkah I: Menghitung nilai total akrual (TAC) yang merupakan selisih dari pendapatan bersih (*net income*) dengan arus kas operasi untuk setiap perusahaan dan setiap tahun pergantian.

$$TAC = Net\ Income - Cash\ Flows\ From\ Operation$$

Langkah II: Menghitung nilai *Non Discretionary Accrual* (NDA) yang merupakan rata-rata total akrual (TAC) dibagi dengan total aktiva periode sebelumnya.

$$NDA_t = \frac{\sum TA}{T}$$

Keterangan :

NDA = *Non Discretionary Accrual*

TAC = Total Akrual yang diskala dengan total aktiva periode_{t-1}

T = 1,2....T Merupakan tahun *subscript*

t = Tahun *subscript* yang mengindikasikan tahun dalam periode estimasi

Langkah III: Menghitung nilai *Discretionary Accrual* (DA), yaitu selisih antara total akrual (TAC) dengan *Non Discretionary Accrual* (NDA). *Discretionary Accrual* merupakan proksi manajemen laba.

$$DA = TAC - NDA$$

2. Model De Angelo

Model lain untuk mendeteksi manajemen laba dikembangkan oleh De Angelo pada tahun (1986).

Langkah I: Menghitung nilai total akrual (TAC) yang merupakan selisih dari pendapatan bersih (*net income*) dengan arus kas operasi untuk setiap perusahaan dan setiap tahun pergantian.

$$TAC = Net\ Income - Cash\ Flows\ From\ Operation$$

Langkah II: Menghitung nilai *Non Discretionary Accrual* (NDA) yang merupakan rata-rata total akrual (TAC) dibagi dengan total aktiva periode sebelumnya.

$$NDA_t = TAC_{t-1}$$

Keterangan : NDA = *Non Discretionary Accrual*
 TAC_t = Total Akrual Periode_t
 TA_{t-1} = Total Akrual Periode_{t-1}

Langkah III: Menghitung nilai *Discretionary Accrual* (DA), yaitu selisih antara total akrual (TAC) dengan *Non Discretionary Accrual* (NDA). *Discretionary Accrual* merupakan proksi manajemen laba.

$$DA = TAC - NDA$$

Adapun indikator yang penulis gunakan untuk mengukur variabel ini adalah indikator menurut Sri Sulistyanto (2008:6) yaitu :

$$DA_{it} = TA_{it} / A_{it-1} - NDA_{it}$$

Keterangan:

DA = *Discretionary Accruals* perusahaan i pada periode ke t

N DA_{it} = *Non Discretionary Accruals* perusahaan i pada periode ke t

TA_{it} = Total akrual perusahaan I pada periode ke t

Nit = Laba bersih perusahaan i pada periode ke- t

CFO _{it}	=	Aliran kas dari aktivitas operasi perusahaan i pada periode ke t
A _{it-1}	=	Total aktiva perusahaan I pada periode ke t-1
Δ Rev _t	=	Perubahan pendapatan perusahaan i pada periode ke t
PPE _t	=	Aktiva tetap perusahaan pada periode ke t
Δ Rec _t	=	Perubahan piutang perusahaan i pada periode ke t = <i>error terms</i>

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh *Tax Planning* Terhadap Manajemen Laba

Menurut (Suandy 2016) menjelaskan bahwa tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang, maka perencanaan pajak disini sama dengan tax avoidance karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali. Perencanaan yang dilakukan secara tidak langsung telah membuktikan bahwa dalam perencanaan pajak terjadi praktik manajemen laba. 29 (Sumomba et al. 2012) berhasil membuktikan bahwa perencanaan pajak dapat digunakan untuk mendeteksi praktik manajemen laba. (Ulfah 2013) pada simposium Nasional Perpajakan menyimpulkan bahwa perencanaan pajak memiliki pengaruh positif, semakin tinggi perencanaan pajak maka semakin besar peluang perusahaan melakukan manajemen laba. Salah satu perencanaan pajak adalah dengan cara mengatur seberapa besar laba yang dilaporkan, sehingga masuk dalam indikasi adanya praktik manajemen laba. (Herdawati 2015) menyimpulkan bahwa Perencanaan pajak memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap

manajemen laba, semakin tinggi perencanaan pajak maka semakin besar peluang perusahaan melakukan manajemen laba (begitupun sebaliknya) walaupun pengaruhnya lemah, artinya masih banyak faktor lain yang menentukan terjadinya manajemen laba.

2.2.2 Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba

Pajak yang ditangguhkan menjadi salah satu cara yang dilakukan manajer untuk merekayasa laporan keuangan dengan melakukan manajemen laba (Sri Sulistyanto, 2008:56)

Semakin besar presentase beban pajak tangguhan terhadap total beban pajak perusahaan menunjukkan standar akuntansi yang semakin liberal (Yulianti, 2005:118). Perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal memiliki hubungan positif dengan insentif pelaporan keuangan seperti financial distress dan pemberian bonus, dengan adanya hal tersebut maka dimungkinkan manajer dapat melakukan rekayasa laba atau earnings management dengan memperbesar atau memperkecil jumlah beban pajak tangguhan yang diakui dengan laporan laba rugi.

Selisih negatif antara laba akuntansi dan laba fiskal mengakibatkan terjadinya koreksi negatif yang menimbulkan terjadinya beban pajak tangguhan (Djamaludin, 2008:58). Beban yang besar akan menurunkan tingkat laba yang diperoleh suatu perusahaan, begitu pula sebaliknya beban yang sedikit akan menaikkan tingkat laba yang diperoleh perusahaan.

Berdasarkan penelitian Philips. et al (2003) membuktikan adanya praktik manajemen laba dengan menggunakan beban pajak tangguhan. Penelitian yang

dilakukan Yulianti (2005) juga menemukan bukti empiris bahwa beban pajak tangguhan memiliki hubungan positif signifikan dengan probabilitas perusahaan untuk melakukan manajemen laba guna menghindari kerugian perusahaan. Manajemen laba merupakan peluang bagi manajemen untuk merekayasa besarnya beban pajak tangguhan guna menaikkan dan menurunkan tingkat labanya. Beban pajak tangguhan mengakibatkan tingkat laba yang diperoleh menurun dengan demikian memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan laba yang lebih besar di masa yang akan datang dan mengurangi besarnya pajak yang dibayarkan.

2.2.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba

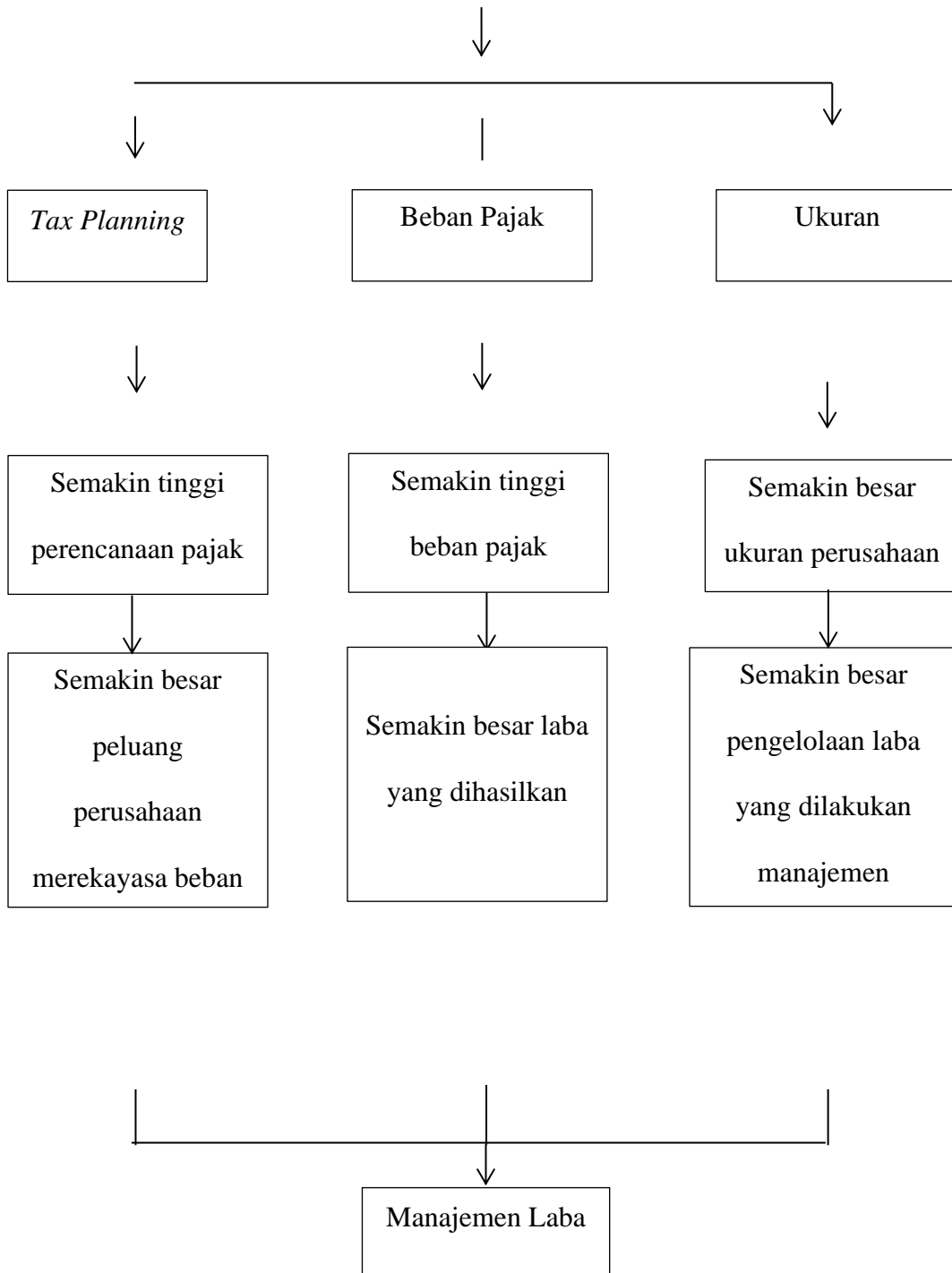
Hubungan antara ukuran perusahaan dengan manajemen laba. Ukuran perusahaan adalah suatu skala di mana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain total aktiva, *log size*, penjualan dan nilai pasar saham. Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin kecil pengelolaan laba yang dilakukan manajemen, sedangkan semakin kecil ukuran perusahaan, maka semakin besar pengelolaan laba yang dilakukan manajemen. menyatakan dimana perusahaan perusahaan kecil lebih cenderung melakukan pengelolaan laba dibandingkan perusahaan besar (Purnama,2017).

Berdasarkan pemaparan di atas maka model kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:

Perusahaan Sub sektor Otomotif di Bursa Efek Indonesia (BEI)



Laporan Keuangan Perusahaan Sub Otomotif di Bursa Efek

**Gambar 2.1****Kerangka Pemikiran**

2.2.4 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil
1.	Yana Ulfa (2013)	Pengaruh beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak terhadap Praktik Manajemen Laba.	Menemukan bahwa beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba.
2.	Dewi & Feni (2012)	Pengaruh aset pajak tangguhan, diskresioner akrual, tingkat hutang, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Penelitian tersebut membuktikan bahwa aset pajak tangguhan, <i>discretionary accrual</i> , dan tingkat hutang tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. Hanya ukuran

			perusahaan yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap manajemen laba.
3.	Ferry Aditama Anna Purwaningsih (2013)	Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Perencanaan pajak tidak berpengaruh positif terhadap manajemen laba pada perusahaan nonmanufaktur yang terdaftar di BEI. Akan tetapi, hasil pada analisis deskriptif menunjukkan bahwa 77 perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini melakukan manajemen laba dengan cara menghindari penurunan laba.

4.	Widyasenja dkk (2015)	Pengaruh <i>tax planning</i> dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba	Perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba, tetapi beban pajak tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.
5.	Vania Ramaditya dan Raharja (2014)	Pengaruh Asimetri Informasi, <i>Leverage</i> , dan Ukuran Perusahaan Terhadap Praktik Manajemen Laba	Asimetri informasi berpengaruh terhadap manajemen laba <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap manajemen laba Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis berasal dari bahasa Yunani: *hypo* yang artinya di bawah dan *thesis* yang artinya pendirian, pendapat yang ditegakkan, kepastian. Hipotesis atau hipotesa merupakan suatu pernyataan yang sifatnya sementara, atau kesimpulan sementara atau dugaan yang bersifat logis tentang suatu populasi.

Sugiyono (2018, 63) menyatakan bahwa pengertian hipotesis adalah sebagai berikut :

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.”

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

- Hipotesis 1 : *Tax planning* berpengaruh terhadap Manajemen Laba.
- Hipotesis 2 : Beban Pajak Tangguhan berpengaruh terhadap Manajemen Laba.
- Hipotesis 3 : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Manajemen Laba.